

Jurnal
**TANAMAN INDUSTRI
DAN PENYEGAR**
Journal of Industrial and Beverage Crops
Volume 6, Nomor 2, Juli 2019

**DUKUNGAN DAN PERAN KELEMBAGAAN DALAM MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN PETANI KAKAO DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***INSTITUTIONAL SUPPORT AND ROLE IN INCREASING THE INTERDEPENDENCE OF COCOA
FARMERS IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE***

* Andri Amaliel Managanta¹⁾, Sumardjo²⁾, Dwi Sadono²⁾, dan Prabowo Tjitropranoto²⁾

¹⁾ **Fakultas Pertanian Universitas Sintuwu Maroso, Poso**
Jalan Pulau Timor No. 1. Sulawesi Tengah, Indonesia.

²⁾ **Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor**
Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

* *andriamanaganta@gmail.com*

(Tanggal diterima: 2 April 2019, direvisi: 7 Juli 2019, disetujui terbit: 30 Juli 2019)

ABSTRAK

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Sulawesi Tengah merupakan sentra produksi komoditas kakao Indonesia, namun dari tahun ke tahun belum banyak mengalami peningkatan. Diduga salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan kelembagaan petani karena kelembagaan dibentuk tidak didasarkan kebutuhan dan kepentingan petani. Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis tingkat dukungan kelembagaan dalam meningkatkan kemandirian petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, dan (2) menganalisis peran dan strategi peningkatan dukungan kelembagaan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian dilaksanakan pada empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: Kabupaten Poso, Sigi, Morowali Utara, dan Donggala. Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 380 petani. Untuk mendeskripsikan peubah penelitian digunakan analisis statistik deskriptif dalam tabel frekuensi dan uji jarak berganda Duncan (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani (70,2%–98,7%) menilai dukungan kelembagaan dalam bidang pemasaran, modal, pengolahan, dan bimbingan teknis relatif rendah sehingga cenderung kurang kondusif bagi peningkatan kemandirian petani. Peran kelembagaan dalam keempat bidang tersebut pun termasuk kategori rendah (26,6–43,0) sehingga perlu mendapat perhatian yang serius.

Kata kunci: Dukungan, kakao, kelembagaan, peran, petani

ABSTRACT

Indonesia is the third largest cocoa producer in the world after Ivory Coast and Ghana. Central Sulawesi is a center of Indonesian cocoa commodity, yet has low improvement. This is presumably due to the lack of support of farmer institutions that were formed not based on farmers' needs or the interests of farmers. The objectives of this study were to: (1) analyze the level of institutional support for cocoa farmers in Central Sulawesi Province, and (2) analyze the role and strategy of increasing institutional support for cocoa farmers in Central Sulawesi Province. The study was conducted in four districts in Central Sulawesi Province: Poso, Sigi, Morowali Utara and Donggala Regencies. The research sample was 380 farmers. To describe the research variables used descriptive statistical analysis in the frequency table and Duncan's Multiple Range Test (DMRT). The results showed that most farmers (70.2%–98.7%) assessed that institutional support in the contexts of marketing, capital, processing, and technical guidance were relatively low so it tended to be less conducive to increasing farmers' independence. The institutional role of those four contexts was also low categorized (26.6–43.0) so that it needs serious attention in an effort to increase the weak independence of farmers.

Keywords: Cocoa, farmer, institution, role, support

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Sulawesi Tengah merupakan daerah sentra produksi kakao Indonesia, namun dari tahun ke tahun belum banyak mengalami peningkatan. Hal ini diduga disebabkan kurangnya dukungan kelembagaan petani karena dibentuk tidak didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan petani. Di sisi lain, pihak yang paling mendapatkan keuntungan dari bisnis kakao adalah perusahaan manufaktur coklat.

Hasil penelitian Managanta, Sumardjo, Sadono, & Tjitropranoto (2018) menunjukkan bahwa kerjasama antara kelembagaan petani dengan pihak bank, industri, dan pemasaran masih rendah. Rendahnya tingkat kerjasama atas dasar saling percaya, saling membutuhkan, saling mengandalkan, dan saling menguntungkan berakibat pada rendahnya pendapatan petani, yaitu rata-rata Rp1.325.030,00/bulan, masih di bawah upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Rp1.807.775,00/bulan. Bitzer & Bijman (2014) mengemukakan bahwa kerjasama seperti itu di negara-negara berkembang memiliki tujuan untuk upaya peningkatan produksi dan pendapatan, sehingga akhirnya petani bisa mandiri.

Pada umumnya, para petani kakao tidak memiliki posisi tawar, di mana peranan pengumpul masih lebih menonjol terutama dalam sistem pemasaran. Petani tidak memiliki modal yang cukup dalam usaha tani kakao, ditambah lagi tingginya tingkat serangan hama dan penyakit kakao. Kondisi tersebut diperberat oleh peran kelembagaan petani yang masih lemah. Kelompok tani yang dibentuk oleh para petani sebagai tempat belajar, bekerja sama, dan unit produksi, kadang dibentuk untuk kepentingan golongan tertentu. Akibatnya, petani hanya sebagai penerima harga (*price taker*) sehingga pendapatan serta kesejahteraan petani menurun.

Hal yang dipahami dan dilakukan petani sangat terbatas dan hanya tertuju pada isu teknologi produksi saja. Kegiatan penyuluhan hanya sekedar menyampaikan teknologi, sementara upaya untuk memahami teknologi dan mencari informasi usaha tani masih kurang. Di lain pihak, petani cenderung mengharapkan bantuan teknologi produksi tanpa berusaha mencari informasi lain yang dapat meningkatkan produktivitas usaha tani. Seharusnya petani kakao mampu memanfaatkan kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi sebagai sarana berbagi informasi, penyedia sarana produksi, penyedia modal, wahana pembelajaran, dan proses pemasaran, sejalan dengan tujuan penyuluhan pada Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Orientasi penyuluhan pembangunan saat ini dan ke depan seharusnya sejalan dengan paradigma pembangunan, yaitu bergeser dari paradigma pertumbuhan ekonomi (*growth*) ke paradigma pemerataan pembangunan (*equity*), dan dua dekade ke depan harus menghasilkan kesadaran akan pentingnya pengembangan paradigma pembangunan berkelanjutan dan paradigma berorientasi pada manusia (*people centered*) (Sumardjo, 2016). Sumber daya manusia pertanian harus berkualitas guna pengembangan usaha tani. Globalisasi ekonomi melahirkan keterbukaan ekonomi dimana perilaku sumber daya manusia dituntut berperilaku modern, adanya efisiensi usaha dan daya saing untuk setiap komoditas, termasuk komoditas pertanian (Sumarjo, 1999). Melalui kelembagaan yang ada, petani harus mampu meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kemandiriannya, serta menguasai teknologi usaha tani kakao seperti fermentasi biji, pembuatan pupuk organik dari kulit buah kakao, penggunaan pestisida nabati, dan peningkatan kemitraan antara industri dengan petani.

Penelitian bertujuan: (1) menganalisis tingkat dukungan kelembagaan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, dan (2) menganalisis peran dan strategi peningkatan dukungan kelembagaan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan rancangan survei yang meliputi empat kabupaten berdasarkan pembagian zona, yaitu wilayah utara Kabupaten Donggala, wilayah barat Kabupaten Sigi, wilayah tengah Kabupaten Poso, dan wilayah tenggara Kabupaten Morowali Utara. Penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2016 sampai Agustus 2017.

Penentuan Sampel dan Definisi Operasional Peubah

Pengambilan sampel dilakukan secara bertahap (*cluster random sampling*), dengan *cluster* desa yang relatif maju dan kurang maju dalam usaha tani. Penentuan lokasi dan sampel dilakukan sebagai berikut: (1) ditetapkan dua desa di setiap kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian dengan kriteria desa yang berkembang dan secara geografis dekat dengan ibu kota kabupaten serta desa yang belum berkembang dan jauh dari ibu kota kabupaten, dan (2) penentuan jumlah sampel untuk setiap desa secara proporsional.

Tabel 1. Indikator, definisi operasional, dan parameter dukungan kelembagaan di Provinsi Sulawesi Tengah
Tabel 1. Indicators, operational definitions, and parameters of institutional support in Central Sulawesi Province

Indikator dukungan kelembagaan	Definisi operasional	Parameter pengukuran
Pemasaran	Peran kelembagaan dalam proses penjualan hasil	Diukur berdasarkan persepsi mengenai: (1) Ketersediaan lembaga dalam memasarkan (2) Jumlah lembaga pemasaran (3) Seberapa sering melakukan penjualan hasil
Modal	Peran kelembagaan dalam penyediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan usaha tani kakao	Diukur berdasarkan persepsi mengenai: (1) Ketersediaan lembaga dalam memberikan sarana (2) Ketersediaan modal (3) Kemudahan akses modal dalam mengembangkan usaha tani
Pengolahan	Peran kelembagaan dalam proses menghasilkan biji kakao kering menjadi bahan siap konsumsi	Diukur berdasarkan persepsi mengenai: (1) Ketersediaan lembaga dalam memberikan sarana (2) Ketersediaan sarana untuk proses menghasilkan biji kakao (3) Kemudahan akses pengolahan
Bimbingan teknis	Peran kelembagaan dalam pendampingan penggunaan sarana produksi	Diukur berdasarkan persepsi mengenai: (1) Ketersediaan lembaga dalam memberikan pelatihan (2) Pelaksanaan pelatihan dari budi daya sampai pemasaran (3) Kemudahan dalam akses bimbingan teknis
Modal sosial	Kerjasama antara petani dengan petani lainnya dalam mengembangkan usaha tani	Diukur berdasarkan persepsi mengenai: (1) Kerjasama (2) Kepercayaan (3) Saling pengertian

Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 380 petani yang tersebar di Kabupaten Donggala 100 petani, Kabupaten Sigi 84 petani, Kabupaten Poso 144 petani dan Kabupaten Morowali Utara 52 petani.

Indikator, definisi operasional, dan parameter pengukuran meliputi: (a) kemudahan dalam memasarkan biji kakao kering, (b) kerjasama industri dan pedagang pengumpul dalam pemasaran, (c) dukungan modal dari tengkulak, kelompok tani, koperasi, bank, dan modal pribadi, (d) keterlibatan industri dalam pengolahan biji kakao kering, (e) keterlibatan kelembagaan penyuluh dan pihak swasta dalam pelaksanaan bimbingan teknis, dan (f) gotong royong dalam menjalankan usaha tani. Indikator, definisi operasional, dan parameter pengukuran tingkat dukungan kelembagaan disajikan pada Tabel 1.

Analisis Data

Kategori pengukuran indikator tingkat dukungan dan peran kelembagaan (pemasaran, modal, pengolahan, bimbingan teknis, dan modal sosial) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah (skor 0,00–50,00), sedang (skor 50,01–75,00), dan tinggi (skor 75,01–100,00). Parameter “tingkat dukungan kelembagaan” diukur berdasarkan seberapa banyak (dalam persen) para petani menilai (mempersiapkan) tingkat dukungan kelembagaan yang ada ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan parameter “peran kelembagaan” diukur berdasarkan nilai rata-rata skor yang diperoleh berdasarkan persepsi petani terhadap indikator kelembagaan yang ada.

Agar semua data yang terkumpul memiliki kisaran nilai yang sama, yaitu nilai 0–100, maka dilakukan transformasi. Menurut Sumarjo (1999)

pedoman transformasi adalah nilai indeks terkecil diberikan untuk nilai skor terendah (0 = nol), dan nilai 100 untuk nilai skor tertinggi. Data dianalisis menggunakan program *Miscrosoft Excel*, dan untuk menganalisis perbedaan antar Kabupaten (Poso, Sigi, Morowali Utara, dan Donggala) dilakukan uji *Duncan's Multiple Ranges Test* (DMRT) dengan menggunakan program SPSS versi 20.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Dukungan Kelembagaan

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa pada umumnya petani (70,2% – 98,7%) menilai dukungan kelembagaan, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun industri terhadap bidang pemasaran, permodalan, pengolahan, dan bimbingan untuk keempat kabupaten (total) masih lemah, sedangkan di bidang modal sosial umumnya petani (52,9%) menilainya ke dalam kategori sedang (Tabel 2).

Tabel 2. Persentase penilaian petani terhadap dukungan kelembagaan dan nilai rata-rata skor penilaian kelembagaan di Provinsi Sulawesi Tengah

Table 2. Percentage of farmer assessment of institutional support and average score of institutional assessment in Central Sulawesi Province

Indikator bidang kelembagaan	Tingkat dukungan kelembagaan dan rata-rata skor	Penilaian petani terhadap dukungan kelembagaan per kabupaten dan total untuk ke-4 kabupaten (%)				
		Poso	Sigi	Morowali Utara	Donggala	Total ²⁾
Pemasaran	• Rendah	81,9	95,2	90,4	93,0	88,9
	• Sedang	17,4	4,8	9,6	7,0	10,8
	• Tinggi	0,7	0,0	0,0	0,0	0,3
	Nilai rata-rata skor per kabupaten ¹⁾	46,9d	41,5c	36,2b	31,2a	-
	Nilai rata-rata skor dari ke-4 kabupaten	(39,0)				-
Modal	• Rendah	72,2	35,7	71,2	96,0	70,2
	• Sedang	27,1	58,3	28,8	4,0	28,2
	• Tinggi	0,7	6,0	0,0	0,0	1,6
	Nilai rata-rata skor per kabupaten ¹⁾	43,4b	54,5c	42,3b	31,9a	-
	Nilai rata-rata skor dari ke-4 kabupaten	(43,0)				-
Pengolahan	• Rendah	99,3	97,6	100,0	98,0	98,7
	• Sedang	0,7	2,4	0,0	2,0	1,3
	• Tinggi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nilai rata-rata skor per kabupaten ¹⁾	28,8c	33,1d	23,7b	20,9a	-
	Nilai rata-rata skor dari ke-4 kabupaten	(26,6)				-
Bimbingan teknis	• Rendah	91,7	96,4	92,3	99,0	94,0
	• Sedang	6,9	2,4	5,8	3,0	4,7
	• Tinggi	1,4	1,2	1,9	1,0	1,3
	Nilai rata-rata skor per kabupaten ¹⁾	30,8c	31,2c	26,5b	22,7a	-
	Nilai rata-rata skor dari ke-4 kabupaten	(27,8)				-
Modal sosial	• Rendah	22,9	44,0	38,5	78,0	44,2
	• Sedang	75,0	50,0	59,6	20,0	52,9
	• Tinggi	2,1	6,0	1,9	2,0	2,9
	Nilai rata-rata skor per kabupaten ¹⁾	57,5b	53,7b	53,8b	40,8a	-
	Nilai rata-rata skor dari ke-4 kabupaten	(51,5)				-

Keterangan : ¹⁾ Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris yang sama berbeda nyata menurut uji *Duncan Multiple Range Test* (DMRT) pada taraf 5%

²⁾ Total dari keempat kabupaten

Notes : ¹⁾ Numbers followed by different letters in the same line are significantly different according to *Duncan Multiple Range Test* (DMRT) at 5% level

²⁾ Totals for all four districts

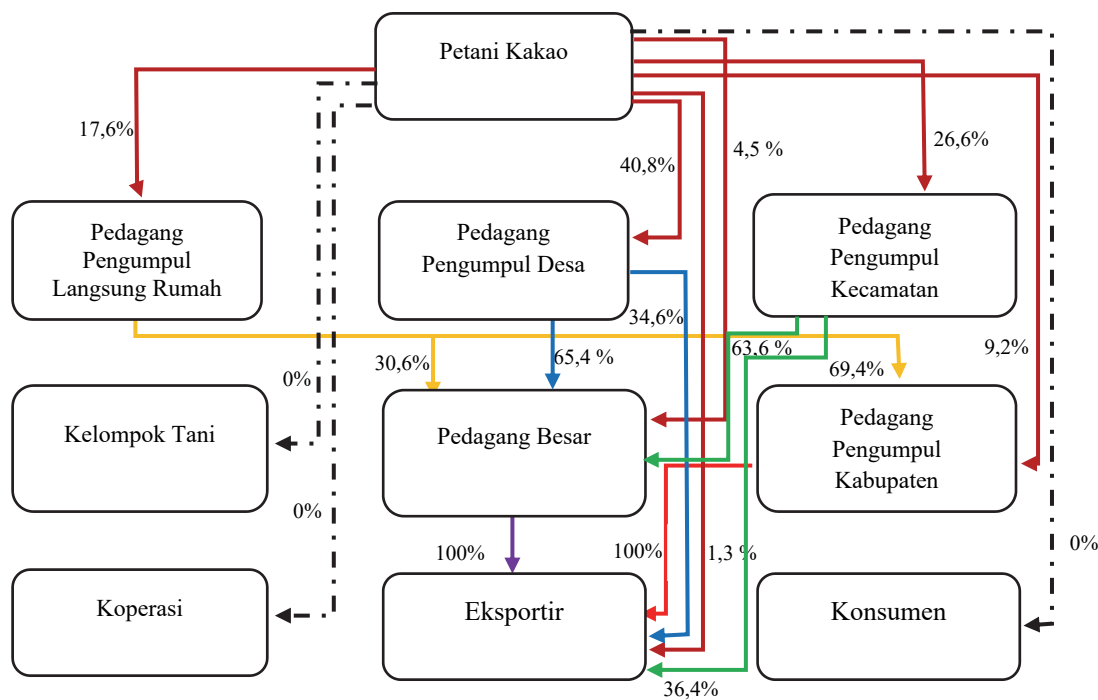
Bidang pemasaran

Sebagian besar petani (88,9%) menilai dukungan kelembagaan untuk bidang pemasaran pada keempat kabupaten ke dalam kategori rendah, sisanya sebesar 10,8% menilainya sedang, dan 0,3% menilainya tinggi (Tabel 2).

Hasil wawancara dengan petani diketahui harga biji kakao kering cenderung menurun, dan pada umumnya harga tersebut dikendalikan oleh pihak pemilik modal. Menurut penilaian lembaga yang dikaji, harga yang paling baik untuk petani pada saat ini berada pada kisaran Rp30.000,00–Rp35.000,00 per kg. Kecenderungan menurunnya harga biji kakao kering disebabkan karena proses penjualan biji kering ditentukan dari jumlah hasil biji kering yang diperoleh petani dari setiap kali panen, jarak petani ke pedagang pengumpul, dan jumlah pedagang pengumpul yang membeli biji kering milik petani. Dalam proses

pemasaran biji kering kakao, pedagang menentukan harga beli, sedangkan petani tidak.

Pada umumnya, petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah menjual biji kakao setelah panen yang kedua karena menurut sebagian petani jumlah biji yang dijualnya lebih banyak dan uang yang diperoleh juga lebih besar dibanding menjual setelah panen pertama. Selain itu, menurut sebagian petani asal Poso, waktu penjualan biji tergantung pada tingkat kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan biaya pendidikan anak. Berdasarkan saluran pemasarannya, persentase petani yang melakukan penjualan biji kakao kering lebih besar ke pedagang pengumpul desa (40,8%), diikuti oleh pedagang pengumpul kecamatan (26,6%), pedagang pengumpul langsung mendatangi rumah petani (17,6%), pedagang pengumpul kabupaten (9,2%), pedagang besar (4,5%), dan eksportir (1,3%) (Gambar 1).



Keterangan/ notes:

- Saluran pemasaran petani kakao/ *Cocoa farmers marketing channel*
- Saluran pemasaran pedagang pengumpul langsung rumah/ *Marketing channel of direct home collectors*
- Saluran pemasaran pedagang pengumpul desa/ *Marketing channel of village collectors*
- Saluran pemasaran pedagang pengumpul kecamatan/ *Marketing channel of sub-district traders*
- Saluran pemasaran pedagang pengumpul kabupaten/ *District collector's marketing channel*
- Saluran pemasaran pedagang besar/ *Big merchant marketing channels*
- - - Saluran pemasaran petani kakao ke kelompok tani, koperasi, dan konsumen/ *Marketing channels of cocoa farmers to farmer groups, cooperatives, and consumers*

Gambar 1. Saluran pemasaran biji kakao kering oleh petani di Provinsi Sulawesi Tengah
Figure 1. Marketing channels of dried cocoa beans by farmers in Central Sulawesi Province

Pada umumnya, petani yang memasarkan biji kakao kering ke pedagang pengumpul kecamatan merupakan petani yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh dari ibukota kecamatan. Petani yang memiliki lahan sempit dan produksinya rendah, memilih memasarkan biji kakao kering ke pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, dan pedagang pengumpul yang mendatangi rumah petani. Sedangkan petani yang melakukan pemasaran ke pedagang pengumpul kabupaten, pedagang besar, dan eksportir, merupakan petani yang memiliki lahan luas dengan produksi tinggi.

Petani melakukan penjualan ke pedagang pengumpul desa dan pedagang yang mendatangi rumah karena adanya keterikatan dana pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan jumlah biji yang dipasarkan serta harga yang berlaku pada saat itu. Posisi tawar petani yang lemah mengakibatkan harga dikendalikan oleh pedagang, sehingga yang diterima petani tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil lainnya menunjukkan bahwa petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya memanfaatkan lembaga pemasaran yang ada seperti kelompok tani dan atau koperasi sebagai agen penjualan. Komoditas kakao berbeda dengan komoditas pangan seperti padi dimana peran kelompok tani dan koperasi dalam proses penjualan padi relatif lebih baik. Menurut Biénabe & Sautier (2004) dan Shiferaw, Obare, Muricho, & Silim (2009), kelembagaan produsen dapat menjadi sarana untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani kecil. Pengembangan lembaga-lembaga lokal untuk meningkatkan kemampuan petani melalui pengenalan berbagai macam inovasi pertanian serta perbaikan proses pemasaran dengan melakukan secara bersama-sama, dapat meningkatkan ekonomi pedesaan.

Beberapa hasil penelitian telah berhasil mengungkap beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para petani kecil (Deressa, Hassan, Ringler, Alemu, & Yesuf, 2009; Shiferaw *et al.*, 2009; Bolwig, Ponte, Toit, Riisgaard, & Halberg, 2010) diantaranya kesulitan dalam memasarkan produk pertanian karena lokasi terpencil, infrastruktur fisik dan ekonomi yang kurang baik, biaya transportasi yang tinggi, hasil dan kualitas hasil rendah, akses informasi kurang memadai, sulitnya akses kredit, serta lemahnya layanan kelembagaan dan daya tawar petani (Pandey, Kumar, & Singh, 2011; Choudhary, Kala, Todaria, Dasgupta, & Kollmair, 2013). Di samping itu, kurangnya fasilitas dan akses informasi yang berkaitan dengan proses penyimpanan dan pengolahan dapat memperburuk masalah bagi petani kecil dalam memasarkan hasilnya (Tiwari *et al.*, 2008; Shahbaz, Ali, Khan, & Ahmad, 2010).

Kerjasama koperasi dan kelompok tani dalam membantu petani untuk proses pemasaran masih belum ditemukan. Begitu juga dalam hal proses pengolahan menjadi produk siap konsumsi serta aspek pemasarannya langsung ke konsumen akhir. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya kelembagaan petani di tingkat pedesaan dan peran lembaga pemerintah, swasta, maupun industri dalam kegiatan pendampingan terhadap petani. Menurut Anantanyu (2011) dan Bitzer, Glasbergen, & Leroy (2013), kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, modal, infrastruktur, dan pasar, serta adopsi inovasi teknologi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.

Bidang permodalan

Hasil penilaian petani terhadap dukungan kelembagaan pada bidang permodalan, 70,2% petani menilai ke dalam kategori rendah, sisanya sebanyak 28,2% sedang, dan 1,6% tinggi (Tabel 2). Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani membutuhkan pengembangan sumber daya modal melalui jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan. Petani yang memiliki akses ke lembaga permodalan akan memiliki kemudahan dalam penyediaan input produksi seperti pupuk, pestisida, peralatan budi daya, peralatan pemanenan, serta peralatan pascapanenan dan pengolahan. Hal tersebut dapat diperoleh dengan adanya dukungan kelembagaan modal yang berpihak pada petani.

Petani menggunakan modal pribadi dalam mengusahakan tanaman kakao yang diperoleh dari hasil penjualan biji kakao kering, beras, jagung, dan pisang, serta sumber modal lainnya seperti berdagang dan menjadi buruh perkebunan kakao atau kelapa sawit. Menurut Indraningsih (2013) penggunaan sarana produksi bergantung pada modal usaha tani yang dimiliki. Selanjutnya Listyati, Wahyudi, & Hasibuan (2014) mengemukakan bahwa permasalahan yang paling sering dihadapi petani yaitu rendahnya kepemilikan modal sehingga berkemampuan terbatas untuk membeli sarana produksi pertanian.

Bidang pengolahan dan bimbingan teknis

Dukungan kelembagaan di bidang pengolahan untuk keempat kabupaten (total), umumnya petani (98,7%) menilainya ke dalam kategori rendah, sisanya sebanyak 1,3% menilainya sedang dan tidak ada petani (0%) yang menilainya tinggi. Hal yang hampir sama terjadi juga pada bidang bimbingan teknis yang umumnya petani (94,0%) menilainya ke dalam kategori rendah, sisanya sebanyak 4,7% menilainya sedang, dan

sebanyak 1,3% menilainya tinggi (Tabel 2). Salah satu indikator rendahnya dukungan kelembagaan dalam bidang pengolahan dan bimbingan adalah petani masih belum melakukan fermentasi biji di dalam kotak fermentasi, melainkan hanya melakukan pemeraman saja.

Berdasarkan hasil diskusi dengan petani serta pengamatan langsung di lapangan, proses dukungan kelembagaan bidang pengolahan dan bimbingan hanya terbatas dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang ada di Sulawesi Tengah dengan materi berupa pelatihan pembuatan bubuk kakao (*cocoa powder*) dan fermentasi biji kakao. Hasil pelatihan tersebut tidak diikuti dengan proses pendampingan yang berkelanjutan sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran petani akan pentingnya nilai ekonomi biji kakao kering yang diolah menjadi bahan setengah jadi atau diolah menjadi produk yang siap dikonsumsi. Menurut sebagian petani asal Kabupaten Sigi, tidak dilakukannya pengolahan biji kering menjadi produk yang siap dikonsumsi disebabkan karena terbatasnya peralatan, lamanya waktu pengolahan, dan terbatasnya akses pasar.

Walaupun dukungan kelembagaan bidang bimbingan masih rendah, namun diantara perusahaan swasta ada yang berperan cukup signifikan dalam bekerjasama dengan petani membuat demplot untuk penerapan metode PsPSP (panen sering atau panen dilakukan seminggu sekali, pemangkasan, sanitasi, dan pemupukan) serta metode sambung samping (*side grafting*) dan sambung pucuk (*top grafting*).

Bidang modal sosial

Sekitar setengah dari jumlah petani responden (52,9%) menilai dukungan kelembagaan terhadap bidang modal sosial di keempat kabupaten (total) termasuk kategori rendah, sisanya sebanyak 44,2% menilainya sedang, dan sebanyak 2,9% menilainya tinggi (Tabel 2).

Pengembangan komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah sudah dilandasi oleh modal sosial yang cukup. Salah satu indikator yang memperkuat itu adalah terbangunnya kerja sama antar petani melalui prinsip gotong-royong dan saling menolong dalam mengembangkan komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil wawancara/diskusi dan pengamatan langsung di lapangan diketahui bahwa prinsip yang dianut oleh para petani dalam mengembangkan tanaman kakao di Sulawesi Tengah dibangun atas dasar saling percaya, tanggung jawab sosial, serta norma sosial dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Cahyono & Adhiatma (2012) mengemukakan bahwa kekuatan kerja sama akan maksimal apabila didukung oleh semangat proaktif dalam menjalin hubungan di atas

prinsip dan sikap partisipatif, saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, dan sikap saling percaya, serta diperkuat lagi oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat.

B. Peran Kelembagaan

Tingginya persentase petani yang menilai rendah untuk bidang pemasaran, permodalan, pengolahan, dan bimbingan mengakibatkan nilai rata-rata skornya untuk keempat kabupaten (total) tersebut berada pada kisaran 26,6–43,0 (kategori rendah) (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan rendahnya peran kelembagaan yang ada dalam meningkatkan kemandirian petani. Sedangkan untuk bidang modal sosial, nilai rata-rata skornya agak tinggi, yaitu 51,5 (kategori sedang) (Tabel 2), sehingga peran kelembagaan dalam bidang sosial untuk meningkatkan kemandirian petani dinilai cukup.

Bidang pemasaran

Tingkat dukungan kelembagaan di bidang pemasaran dinilai masih rendah. Hal ini pun diperkuat oleh nilai rata-rata skornya di keempat kabupaten termasuk kategori rendah (39,0) (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan bahwa peran kelembagaan dalam bidang pemasaran untuk meningkatkan kemandirian petani di Sulawesi Tengah dinilai masih rendah. Apabila ditinjau per kabupaten, walaupun seluruh kabupaten termasuk kategori rendah, ternyata Kabupaten Poso masih relatif lebih baik (rata-rata nilai skor 46,9) bila dibandingkan dengan Kabupaten Sigi (rata-rata nilai skor 41,5), Morowali Utara (rata-rata nilai skor 36,2), dan Donggala (rata-rata nilai skor 31,2) (Tabel 2).

Selama ini proses penjualan biji kakao kering di setiap kabupaten harganya ditentukan oleh pedagang pengumpul. Pada beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Sigi, proses penjualan biji kakao kering pada saat-saat tertentu (terutama saat musim hujan) sulit dilakukan karena akses jalan sangat tidak mendukung. Akibatnya dalam penjualan biji kakao lebih memanfaatkan pedagang pengumpul desa atau pedagang pengumpul yang langsung mendatangi rumah petani.

Menghadapi kondisi seperti di atas, seharusnya kelembagaan lokal lebih berperan dalam meningkatkan fungsi pasar, membangun sarana pengolahan, dan meningkatkan modal usaha tani. Hal ini sejalan dengan penelitian Shiferaw, Obare, & Muricho (2008) dan Shiferaw *et al.* (2009) bahwa kelembagaan-kelembagaan lokal mampu meningkatkan kemandirian petani, melalui penyediaan inovasi dan memperbaiki proses pemasaran. Pemasaran sebaiknya dilakukan secara bersama-sama agar peningkatan ekonomi petani meningkat.

Kegiatan pemasaran merupakan hal penting dalam merangsang petani meningkatkan produksinya.

Pasar merupakan salah satu syarat penting dalam pembangunan pertanian, karena pasar akan menentukan besarnya permintaan suatu komoditas (Mosher, 1981). Pemasaran yang efektif sangat penting dalam penjualan biji kakao dan salah satunya dipengaruhi tingkat dan stabilitas harga. Semakin tinggi dan stabil harga jual biji kakao, maka petani akan termotivasi untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas kakao di tingkat petani akan mengalami kendala apabila tidak diikuti oleh upaya perbaikan dan penyempurnaan bidang pemasaran, dan lebih spesifik lagi adalah meningkatkan kemampuan petani dalam proses pemasaran.

Bidang permodalan

Peran kelembagaan dalam bidang permodalan untuk keempat kabupaten tergolong kategori rendah (nilai rata-ran skor 43,0). Apabila ditinjau per kabupaten, nilai rata-ran skor untuk Kabupaten Sigi relatif lebih baik dan termasuk kategori sedang (nilai rata-ran skor 54,5) dibandingkan dengan Kabupaten Poso (nilai rata-ran skor 43,4), Morowali Utara (nilai rata-ran skor 42,3), dan Donggala (nilai rata-ran skor 31,9). Kabupaten Poso tidak berbeda dengan Morowali Utara, tetapi keduanya lebih baik daripada Kabupaten Donggala (Tabel 2).

Berdasarkan hasil wawancara/diskusi dengan petani, diketahui bahwa sebagian besar petani (sekitar 90%) membutuhkan dukungan modal melalui bank dan koperasi tani, sedangkan sisanya (10%) mampu membiayai usaha taninya sendiri. Hasil lainnya menunjukkan bahwa umumnya petani lebih mudah mendapatkan bantuan modal yang berasal dari pedagang pengumpul dengan prasyarat yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga kredit lainnya. Menurut Anantanyu, Slamet, & Tjitropranoto (2009) dan Yantu, Juanda, Siregar, & Gonarsyah (2010), akses ke kelembagaan kredit seperti bank sering terkendala dengan masalah agunan.

Bidang pengolahan dan bimbingan teknis

Peran kelembagaan dalam bidang pengolahan dan bimbingan teknis di Provinsi Sulawesi Tengah masih dinilai rendah (nilai rata-ran skor masing-masing 26,6 dan 27,8). Berdasarkan hasil uji beda menunjukkan adanya perbedaan peran kelembagaan di bidang pengolahan dan bimbingan antar kabupaten. Kabupaten Sigi relatif lebih baik peran kelembagaan bidang pengolahannya (nilai rata-ran skor 31,1) dibandingkan tiga kabupaten lainnya (nilai rata-ran skor 20,9–28,8). Sedangkan untuk bidang bimbingan, Kabupaten Poso dan Sigi sama baiknya (masing-masing nilai rata-ran skornya 30,8 dan 31,2), tetapi keduanya lebih baik daripada Kabupaten Morowali Utara (nilai rata-ran skor 26,5) dan Donggala (nilai rata-ran skor 22,7) (Tabel 2). Kabupaten Poso dan

Sigi menjadi sasaran pemerintah, pihak swasta, maupun industri untuk terbentuknya kerja sama karena kedua kabupaten tersebut memiliki luas lahan dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Morowali Utara dan Donggala.

Rendahnya peran kelembagaan di bidang pengolahan dan bimbingan akan memengaruhi upaya peningkatan kemandirian petani. Hasil penelitian Managanta, Sumardjo, Sadono, & Tjitropranoto (2018) menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi (budi daya, pemanenan, pascapanen, pengolahan, pemasaran), kapasitas (pengelolaan usaha tani, pengorganisasian petani, adaptasi lingkungan) dan kemandirian (daya saring, saing, sanding) petani kakao berdampak pada terbatasnya kemampuan petani dalam beradaptasi terhadap lingkungan usaha tani.

Terkait dengan upaya peningkatan kemandirian petani, hasil penelitian Managanta, Sumardjo, Sadono, & Tjitropranoto (2018b) menyimpulkan bahwa peningkatan kemandirian petani kakao difokuskan pada kemampuan petani dalam berdaya saring, daya saing, dan daya sanding. Pengembangan difokuskan pada peningkatan: (1) kemampuan petani memutuskan penggunaan pupuk yang tepat dalam upaya peningkatan produktivitas kakao, (2) kemampuan memutuskan pestisida yang tepat dalam memberantas serangan hama penyakit tanaman kakao, (3) kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah rendahnya produksi klon kakao yang berkualitas, (4) meningkatkan kualitas biji kakao kering melalui proses fermentasi, (5) menghasilkan biji kakao kering yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dan (6) kemampuan memperluas kerja sama dengan industri, swasta, dan lembaga penyuluhan dalam proses penyediaan modal, proses penyuluhan, serta pemasaran.

Dampak dari rendahnya peran kelembagaan petani kakao di Sulawesi Tengah, terutama dalam bidang pemasaran, permodalan, pengolahan, dan bimbingan, akan mempersulit pemerintah mencapai targetnya untuk menjadi produsen terbesar dunia. Oleh karena itu, untuk mempermudah tercapainya target tersebut maka perlu peningkatan dukungan dan peran kelembagaan yang ada dalam upaya meningkatkan kemandirian petani dalam berusaha tani kakao. Melalui peningkatan dukungan dan peran kelembagaan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan kakao dalam negeri akan relatif mudah untuk dicapai.

Bidang modal sosial

Peran kelembagaan dalam bidang modal sosial di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori sedang (nilai rata-ran skor 51,5). Nilai rata-ran skor untuk Kabupaten Poso, Sigi, dan Muarawali Utara tidak

berbeda nyata masing-masing 57,5; 53,7; dan 53,8, tetapi ketiganya lebih baik dibandingkan Kabupaten Donggala (nilai rata-rata skor 40,8) (Tabel 2).

Untuk meningkatkan kemandirian petani kakao di Sulawesi Tengah, maka peran kelembagaan dalam bidang sosial masih perlu terus ditumbuhkembangkan hingga sampai pada kategori tinggi. Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah peningkatan kerja sama dalam kelompok tani terkait dengan masalah pemasaran, permodalan, pengolahan, dan bimbingan. Di samping kelembagaan kelompok tani, dibutuhkan juga dukungan dan peran kelembagaan lain seperti lembaga pemerintah, swasta, pihak industri, dan lembaga-lembaga asosiasi lainnya yang terkait dengan pengembangan komoditas kakao.

KESIMPULAN

Sebagian besar petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah (70,2%–98,7%) menilai dukungan kelembagaan untuk bidang pemasaran, permodalan, pengolahan, dan bimbingan teknis relatif rendah, sehingga berdampak kurang kondusif bagi upaya peningkatan kemandirian petani. Sedangkan dalam bidang modal sosial, sekitar 52,9% petani menilainya sedang, sehingga relatif dapat mempermudah petani dalam mengembangkan usaha taninya.

Peran kelembagaan dalam bidang pemasaran, permodalan, pengolahan, dan bimbingan teknis termasuk kategori rendah (nilai rata-rata skor 26,6 - 43,0) sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya meningkatkan kemandirian petani. Untuk bidang modal sosial, peran kelembagaan termasuk kategori sedang (nilai rata-rata skor 51,1) dan hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan hingga dapat mencapai kategori tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) atas penyediaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S., Slamet, M., & Tjitropranoto, P. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan*, 5(1), 81–91.
- Biénabe, E., & Sautier, D. (2004). The role of small scale producers' organizations to address market access. In *Crop Post Harvest Programme and Practical Action* (pp. 1–16).
- Bitzer, V., & Bijman, J. (2014). Old oranges in new boxes? Strategic partnerships between emerging farmers and agribusinesses in South Africa. *Journal Global Networks*, 40(1), 167–183.
- Bitzer, V., Glasbergen, P., & Leroy, P. (2013). Bitzier - emergence of networks of partnerships in the cocoa sector. *Journal Global Networks*, 12(3), 355–374.
- Bolwig, S., Ponte, S., du Toit, A., Riisgaard, L., & Halberg, N. (2010). Integrating poverty and environmental concerns into value-chain analysis: A conceptual framework. *Development Policy Review*, 28(2), 173–194. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2010.00480.x>
- Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2012). Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 1(1), 131–144.
- Choudhary, D., Kala, S., Todaria, N., Dasgupta, S., & Kollmair, M. (2013). Marketing of bay leaf in Nepal and Northern India: Lessons for improving terms of participation of small farmers in markets. *Small-Scale Forestry*, 12(2), 289–305. <https://doi.org/10.1007/s11842-012-9212-4>
- Deressa, T. T., Hassan, R. M., Ringler, C., Alemu, T., & Yesuf, M. (2009). Determinants of farmers' choice of adaptation methods to climate change in the Nile Basin of Ethiopia. *Global Environmental Change*, 19(2), 248–255. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.01.002>
- Indraningsih, K. S. (2017). Pengaruh penyuluhan terhadap keputusan petani dalam adopsi inovasi teknologi usaha tani terpadu. *Jurnal Agro Ekonomi*, 29(1), 1. <https://doi.org/10.21082/jae.v29n1.2011.1-24>

- Listyati, D., Wahyudi, A., & Hasibuan, A. M. (2016). Penguatan kelembagaan untuk peningkatan posisi tawar petani dalam sistem pemasaran kakao. *Jurnal Tanaman Industri Dan Penyegar*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.21082/jtidp.v1n1.2014.p15-28>
- Managanta, A. A., Sumardjo, Sadono, D., & Tjitropranoto, P. (2018). Influencing factors the interdependence of cocoa farmers in Central Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 8(1), 106–113.
- Mosher, A. T. (1981). *Menggerakkan dan membangun pertanian*. Jakarta: Yasaguna.
- Pandey, D., Kumar, A., & Singh, R. (2011). Marketing of sweet orange (Malta) in Kumaon region of Uttarakhand. *Journal of Recent Advances in Applied Sciences*, 26, 6–11.
- Scharmer, G. B., & Henriques, V. M. J. (2011). SST/CRISP Observations of convective flows in a sunspot penumbra. *Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (SEPA)*, 7(2), 102–109. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201118026>
- Shahbaz, B., Ali, T., Khan, I. A., & Ahmad, M. (2010). An analysis of the problems faced by farmers in the mountains of northwest Pakistan: Challenges for agri extension. *Pakistan Journal of Agricultural Science*, 47(4), 417–420.
- Shiferaw, B., Obare, G., & Muricho, G. (2008). Rural market imperfections and the role of institutions in collective action to improve markets for the poor. *Natural Resources Forum*, 32(1), 25–38. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2008.00167.x>
- Shiferaw, B., Obare, G., Muricho, G., & Silim, S. (2009). Leveraging institutions for collective action to improve markets for smallholder producers in less-favored areas. *Affare*, 3(1), 1–18.
- Sumardjo. (2016). Orientasi penyuluhan pembangunan: mencerdaskan masyarakat mewujudkan kesejahteraannya secara partisipatif berkeadilan. In PAPPi (Ed.), *Simposium Nasional Penyuluhan Pembangunan Berkelanjutan dan Kongres II PAPPi*. Bogor (pp. 1–15). Bogor.
- Sumarjo. (1999). Transformasi penyuluhan pertanian menuju pengembangan kemandirian petani. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Tiwari, K. R., Nyborg, I. L. P., Sitaula, B. K., & Paudel, G. S. (2008). Analysis of the sustainability of upland farming systems in the Middle Mountains region of Nepal. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 6(4), 289–306. <https://doi.org/10.3763/ijas.2008.0390>
- Yantu, M. R., Juanda, B., Siregar, H., & Gonarsyah, I. (2010). Integrasi pasar kakao biji perdesaan Sulawesi Tengah dengan pasar dunia (Integration of cocoa bean at the rural markets in Central Sulawesi Province with the world market). *Jurnal Agro Ekonomi*, 28(2), 201–225.